

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POSO TAHUN 2013-2014

Indra Pancanugraha

indrapanca12@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

This research aims to analyze the performance of the Department of Religious Affairs of Poso in 2013 to 2014 with Value For Money Approach based on the elements of economy, efficiency, and effectiveness. Based on the value for money approach from economics aspect, the department of religious affairs has been conducting its programs economically, these include: managerial support program and other technical issues, Islamic community guidance program, Islamic education program, Christian community guidance program, and program of hajj and umroh. All these programs achieved their objectives except program of hajj and umroh, which output is not reached. Performance from efficiency element shows that the office has been running its programs efficiently, program of managerial support program and the other technical issue, and Islamic community guidance program have achieved their output; Islamic education program and Christian community guidance program has been running quite efficiently with output performance achieved; meanwhile, program of hajj and umroh has been running highly efficient but the output is unreached. The results from effectiveness element show that the office of religious affairs has been running its program pretty effective; these include managerial support and other technical issues; while Islamic community guidance, Islamic education program and Christian guidance program are effectively implemented; program hajj and umroh is ineffective.

Keywords: *Value for money, economy, efficient, and effectiveness*

Kementerian Agama merupakan salah satu instansi pemerintah pusat yang dituntut publik untuk melakukan reformasi birokrasi. Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya belum dapat bekerja secara maksimal karena masih banyaknya hambatan yang dihadapi dan masih cukup banyak keluhan yang disampaikan masyarakat. Misalnya seperti salah satu berita dalam *website* *antaranews.com* pada tanggal 28 februari 2009 Menteri Agama (menag) saat itu Muhammad Maftuh Basyuni meminta jajarannya untuk lebih meningkatkan profesionalisme, karena kinerja aparat Kementerian Agama banyak menjadi sorotan sehingga profesionalisme aparatur menempati posisi strategis dalam pelaksana sekaligus penanggungjawab program karena masih terdapat kesenjangan antara program yang dilaksanakan dengan kinerja yang dihasilkan.

Media massa baik cetak maupun elektronik juga tidak sedikit yang menyoroti tentang kinerja Kementerian Agama. Misalnya seperti salah satu berita *jnn.com* (2015), berita tersebut menjelaskan tentang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kembali mengusulkan tambahan anggaran sebesar 5,9 triliun untuk RAPBN perubahan Tahun 2015. Dari angka yang diusulkan 2,7 triliun akan digunakan untuk tunjangan kinerja pegawai kemenag yang merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi. Berita lainnya berasal dari *antaranews.com* (2015) yang memberitakan bahwa inspektorat jenderal Kementerian Agama M. Jasin menegaskan bahwa akuntabilitas Kementerian Agama akan meningkat jika aparaturnya dapat bekerja berdasarkan indikator dan target kerja yang jelas.

Kabupaten Poso merupakan daerah di Sulawesi Tengah yang pernah terjadi konflik antar masyarakat pada Tahun 1998-2001 sehingga diperlukan peran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Poso yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah tersebut.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso dalam mewujudkan visi dan misi mempunyai kendala dalam merealisasikan semua program kerja yang telah dicanangkan diantaranya tidak berimbangnya dana yang disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) jika dibandingkan dengan program yang dilaksanakan, kondisi geografis Kabupaten Poso yang masih terdapat daerah-daerah yang terisolir dan masih sulit dijangkau, kemudian masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan kehidupan yang agamis dalam kesehariannya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso dengan pendekatan *Value for Money* dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang ingin mengetahui kinerja Kantor Kementerian Agama kabupaten Poso dengan menggunakan *Value for Money*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, perilaku, peristiwa-peristiwa, pengetahuan dan objek studi yang dapat diamati oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan Pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan dengan jenis penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan atau fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber asli. Metode ini merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan atau pernyataan tertulis dan lisan yang memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (informan) untuk memperoleh data yang diinginkan.

Informan dan Data yang Dianalisis

Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi bimbingan masyarakat Islam, kepala seksi pendidikan Islam, kepala seksi bimbingan masyarakat Kristen, dan kepala seksi penyelenggara haji dan umrah. kemudian yang menjadi informan kunci adalah seluruh kepala seksi yang bertanggungjawab pada masing-masing program.

Data yang dianalisis yaitu kegiatan yang hasilnya bisa langsung diukur dan dapat dirasakan pada pihak internal maupun eksternal pada Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Program Bimbingan Masyarakat Islam, Program Pendidikan Islam, Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dan Program Penyelenggara Haji dan Umrah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan keterangan yang lengkap dan benar agar pihak lain lebih mudah memperoleh gambaran dari obyek hasil penelitian. Langkah-langkah analisis data untuk mengukur kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso adalah sebagai berikut: pertama, mengumpulkan dan mengidentifikasi data penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, dan

target yang hendak dicapai pada program maupun kegiatan. Kedua, untuk menganalisa efisiensi dan efektivitas kinerja menggunakan perbandingan antara data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2013-2014 dengan laporan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014. Analisa data dimulai dengan menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso, merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja dengan cara menetapkan tujuan atau *outcome* yang diharapkan dengan jelas, dan menjelaskan keterkaitan antara *outcome* yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan unit kerja. Keempat, mendeskripsikan data penelitian yang terkait dengan materi kajian penelitian, kemudian dianalisis dan mendeskripsikan data yang berlandaskan teori yang relevan dan memberikan simpulan dari hasil analisis dan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Poso ditinjau dari elemen Ekonomi

Berdasarkan realisasi anggaran Tahun 2013-2014, berikut ini data pengukuran ekonomi pada tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Pengukuran Ekonomi

Program	Kegiatan	2013		2014	
		ekonomis	Penghematan	ekonomis	Penghematan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2096 Pembinaan kerukunan Hidup Umat Beragama	100%	Rp -	92%	Rp 23.950.000
	2098 Pembinaan SDM di bidang Hukum	96%	Rp 1.460.000	-	-
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	98%	Rp 901.550	77%	Rp 5.700.000
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	98%	Rp 479.000	53%	Rp 37.119.250
Bimbingan Masyarakat Islam	2121 Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf	83%	Rp 7.361.000	92%	Rp 2.648.000
	2122 pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat	97%	Rp 2.351.200	95%	Rp 1.518.000
	2123 pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam	97%	Rp 3.271.100	100%	Rp -
	2124 pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	-	-	88%	Rp 3.760.000
Pendidikan Islam	2128 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi pendidikan keagamaan islam	100%	Rp -	89%	Rp 13.423.100
	2129 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi RA dan madrasah	99%	Rp 125.000	47%	Rp235.500.000

Program	Kegiatan	2013		2014	
		ekonomis	Penghematan	ekonomis	Penghematan
Pendidikan Islam	2128 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi pendidikan keagamaan islam	100%	Rp -	89%	Rp 13.423.100
	2129 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi RA dan madrasah	99%	Rp 125.000	47%	Rp235.500.000
Bimbingan Masyarakat Kristen	2136 Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama kristen	99%	Rp 110.000	-	-
	2137 pengelolaan dan pembinaan urusan agama kristen	100%	Rp -	100%	Rp -
Penyelenggara Haji dan Umrah	2147 Pelayanan haji	100%	Rp -	100%	Rp -
	2148 pembinaan haji dan umrah	94%	Rp 2.072.727	99%	Rp 660.000

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Poso diolah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Berdasarkan hasil pengukuran ekonomi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 berada pada kategori ekonomis, walaupun terjadi fluktuasi persentase ekonomis pada tahun 2013 ke Tahun 2014 mengalami kenaikan 22%, dari 98% menjadi 76%. Tingkat ekonomi pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp.2.840.550,- atau sebesar 98% (ekonomis), sedangkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.66.769.250,- atau sebesar 76% (ekonomis).

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran ekonomi pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun 2013 kegiatan Pembinaan SDM di bidang hukum merupakan kegiatan dengan ekonomis tertinggi 96% dengan penghematan Rp.1.460.000,-. Kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi terendah yaitu pembinaan kerukunan hidup umat beragama karena realisasi anggarannya 100% yang berarti ekonomis berimbang.

Pada Tahun 2014 kegiatan dengan nilai penghematan tertinggi ada pada kegiatan pembinaan administrasi umum mempunyai nilai ekonomi 53% dengan penghematan Rp.37.119.250,- Sedangkan kegiatan dengan nilai ekonomi terendah pada kegiatan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

mempunyai nilai ekonomi 92% dengan penghematan Rp.23.950.000,-.

Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Poso ditinjau dari elemen Efisiensi

Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah rendahnya sebaliknya apabila rasio *input* lebih tinggi dari *output* berarti tidak efisien. Berikut ini adalah Tabel mengenai pengukuran efisien pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2013-2014.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Efisiensi

Program	Kegiatan	2013			2014		
		input	output	keterangan	input	output	keterangan
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2096 Pembinaan kerukunan Hidup Umat Beragama	100%	100%	efisien Berimbang	95%	100%	efisien
	2098 Pembinaan SDM di bidang Hukum	98%	100%	efisien	-	-	-
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	99%	100%	efisien	88%	100%	efisien
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	99%	100%	efisien	76%	100%	efisien
Bimbingan Masyarakat Islam	2121 Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf	91%	100%	efisien	96%	100%	efisien
	2122 pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat	99%	100%	efisien	98%	100%	efisien
	2123 pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam	98%	100%	efisien	100%	100%	efisien Berimbang
	2124 pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	-	-	-	94%	100%	efisien
Pendidikan Islam	2128 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi pendidikan keagamaan islam	100%	100%	efisien Berimbang	93%	100%	efisien
	2129 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi RA dan madrasah	100%	100%	efisien Berimbang	47%	47%	tidak efisien
Bimbingan Masyarakat Kristen	2136 Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama kristen	99%	100%	efisien	-	-	-
	2137 pengelolaan dan pembinaan urusan agama kristen	100%	100%	efisien Berimbang	100%	100%	efisien Berimbang
Penyelenggara Haji dan Umrah	2147 Pelayanan haji	100%	48%	tidak efisien	100%	307%	efisien
	2148 pembinaan haji dan umrah	97%	26%	tidak efisien	99%	563%	efisien

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Poso, diolah

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran efisien pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada periode Tahun 2013 Kegiatan Pembinaan SDM di bidang hukum merupakan kegiatan dengan efisiensi tertinggi 98% dengan *output* 100%. Hal itu disebabkan karena masih ada belanja operasional kegiatan seperti pembelian alat tulis kantor dan perlengkapan peserta maupun perlengkapan untuk kegiatan yang tidak dicairkan sehingga kembali ke kas negara. Untuk kegiatan yang mempunyai nilai efisiensi terendah yaitu pembinaan kerukunan hidup umat beragama dengan nilai 100% yang berarti efisien berimbang hal ini disebabkan anggaran yang direalisasikan berupa bantuan operasional untuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) selama satu tahun yang ditransfer langsung ke rekening FKUB. Kegiatan ini merupakan Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang rutin setiap tahun dilaksanakan untuk menunjang operasional FKUB.

Pada periode Tahun 2014 Kegiatan dengan efisiensi tertinggi ada pada kegiatan pembinaan administrasi umum mempunyai rasio *input* 76% dengan *output* 100% hal ini disebabkan adanya pemangkasan anggaran pada tahun 2014 sehingga belanja perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya yang bisa dihemat untuk tidak dicairkan namun tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan. Sedangkan kegiatan dengan nilai efisiensi terendah pada kegiatan pembinaan kerukunan hidup umat beragama mempunyai nilai efisiensi 94% dengan *output* 100% hal ini juga disebabkan karena anggaran perjalanan dinas dan operasional kegiatan yang masih ada tersisa namun tidak dicairkan. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Tahun 2014 lebih efisien dari Tahun 2013 dalam pelaksanaan anggarannya walaupun anggaran untuk Program tersebut pada Tahun 2014 lebih besar dari Tahun 2013.

Penelitian ini sesuai dengan konsep efisiensi menurut Mardiasmo (2009:132)

pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Annisa (2011) bahwa nilai efisiensi pada ketiga program Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari *output* pada setiap program yang penulis teliti mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* minimal atau *input* yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Nugrahani (2007) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemda DIY cukup ekonomis dan efisien tetapi kurang efektif. Pencapaian ekonomis pada Tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 19%, tetapi pencapaian efisiensi turun sebesar 19% dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2003. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya. Dengan demikian kinerja Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Tahun 2013 dan 2014 dapat dikatakan efisien.

Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Poso ditinjau dari elemen Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal terpenting dalam efektivitas adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai tujuan tertentu melainkan hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kinerja organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui terlaksananya semua program atau kegiatan yang telah direncanakan. Berikut ini

data pengukuran efektivitas Tahun 2013 dan 2014 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pengukuran Efektivitas

Program	Kegiatan	2013	2014
		Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2096 Pembinaan kerukunan Hidup Umat Beragama	100%	98%
	2098 Pembinaan SDM di bidang Hukum	90%	0%
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	93%	95%
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	96%	98%
Bimbingan Masyarakat Islam	2121 Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan wakaf	100%	100%
	2122 pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat	100%	100%
	2123 pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam	100%	100%
	2124 pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	0%	100%
Pendidikan Islam	2128 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi pendidikan keagamaan islam	100%	100%
	2129 peningkatan akses, mutu kesejahteraan, dan subsidi RA dan madrasah	100%	47%
Bimbingan Masyarakat Kristen	2136 Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama kristen	100%	0%
	2137 pengelolaan dan pembinaan urusan agama kristen	100%	100%
Penyelenggara Haji dan Umrah	2147 Pelayanan haji	48%	307%
	2148 pembinaan haji dan umrah	6%	553%

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Poso, diolah

Tabel 4. Kategori Nilai Capaian

No	Jumlah Capaian	Kategori
1	> 90%	Sangat Baik
2	75% < x ≤ 90%	Baik
3	55% < x ≤ 75%	Cukup
4	≤ 55%	Kurang

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Poso

Tahun 2013 kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama merupakan kegiatan dengan nilai efektivitas tertinggi 100%, karena tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk dapat membantu operasional FKUB

sehingga dapat terlaksana dengan baik dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Untuk kegiatan yang mempunyai nilai efektivitas terendah yaitu pembinaan administrasi kepegawaian dengan nilai 93%, walaupun terendah tapi masih dalam kategori sangat baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta kegiatan tentang pembinaan administrasi kepegawaian yang meliputi Peraturan Pemerintah No 53 tentang disiplin pegawai dan terkait dengan permasalahan mutasi dan kenaikan pangkat. Target peserta sebanyak 90 orang dan yang terealisasi hanya 84 orang.

Tahun 2014 Kegiatan dengan nilai efektivitas tertinggi ada pada kegiatan pembinaan administrasi umum mempunyai nilai efektivitas 98%, Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta kegiatan tentang pembinaan administrasi umum yang meliputi tata persuratan, dan arsiparis dengan target peserta sebanyak 100 orang namun yang terealisasi hanya 98 orang. Realisasi ini meningkat dari tahun 2013 yang hanya 96 orang. Sedangkan kegiatan dengan nilai efektivitas terendah yaitu kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian mempunyai nilai efektivitas 95%, walaupun terendah tapi masih dalam kategori sangat baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta kegiatan tentang pembinaan administrasi kepegawaian yang meliputi Peraturan Pemerintah No 53 tentang disiplin pegawai dan terkait dengan permasalahan mutasi dan kenaikan pangkat. Target peserta sebanyak 60 orang dan yang terealisasi hanya 57 orang. Realisasi ini menurun dari tahun 2013 yang berjumlah 84 orang namun secara persentase efektivitas meningkat dari 93% Tahun 2013 menjadi 95% Tahun 2014.

Penelitian ini sejalan dengan konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Mahsun (2009:183) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuannya maka organisasi tersebut dikatakan

telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Anggadini (2012) yang menjelaskan efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Penelitian ini juga sejalan dengan Sari (2014) perkembangan kinerja Pemerintah Daerah Sumenep jika dilihat dari rasio efektivitas mengalami peningkatan walaupun pada Tahun 2010 menunjukkan kinerja Pemerintah termasuk kategori tidak efektif, namun pada tahun 2011 hingga Tahun 2013 kinerja pemerintah meningkat dan berada pada kategori efektif. Hasil penelitian Hidayat (2015) program dan kegiatan yang telah dijalankan Dinas Pendidikan Kota Surabaya berhasil dilaksanakan secara efektif walaupun terjadi fluktuasi persentase efektivitas pada Tahun 2013 ke Tahun 2014.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data penelitian dan pembahasan dengan pendekatan *Value for Money*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso di tinjau dari elemen ekonomi diketahui bahwa:
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso pada Tahun 2013 telah menjalankan Programnya dengan ekonomis kecuali Program Penyelenggara Haji dan Umrah output tidak tercapai.
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso pada Tahun 2014 telah menjalankan Programnya dengan ekonomis kecuali Program pendidikan Islam dan Program Penyelenggara Haji dan Umrah outputnya tidak tercapai.

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso di tinjau dari elemen efisiensi diketahui bahwa:
 - a. Kantor Kementerian Agama kabupaten poso pada Tahun 2013 telah menjalankan Programnya dengan efisien sedangkan pada Program Penyelenggara Haji dan umrah dalam pelaksanaannya sangat efisien tetapi output tidak tercapai.
 - b. Kantor Kementerian Agama kabupaten poso pada Tahun 2014 telah menjalankan Programnya dengan efisien kecuali Program Penyelenggara Haji dan umrah dalam pelaksanaannya tidak efisien dengan output melebihi dari target yang direncanakan. Program pendidikan Islam dalam pelaksanaannya sangat efisien tetapi output yang tidak tercapai.
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso di tinjau dari elemen efektivitas diketahui bahwa:
 - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso pada Tahun 2013 telah menjalankan Programnya dengan cukup efektif kecuali Program Penyelenggara Haji dan Umrah dalam pelaksanaannya tidak efektif.
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso pada Tahun 2014 telah menjalankan Programnya dengan efektif kecuali Program Penyelenggara Haji dan umrah dalam pelaksanaannya cukup efektif.

Rekomendasi

Dari beberapa permasalahan yang ada dari penelitian ini dapat ditarik saran untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso dalam proses perencanaan anggaran sebaiknya mengetahui rincian data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program atau kegiatan serta mengevaluasi Program pada periode sebelumnya sehingga tidak terjadi selisih

anggaran yang terlalu besar antara rencana anggaran dan realisasi anggaran, begitu juga rencana output kegiatan dengan target output.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis akui bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, petunjuk dan arahan yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada kepada Ketua Tim Pembimbing Prof. Dr. Anhulaila M. Palampanga, M.S dan Anggota Tim Pembimbing Dr. H. Mohammad Iqbal B, SE.,Ak., M.Si.CA, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Makassar Melalui Pendekatan *Value For Money*. *Jurnal*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anggadini, Sri Dewi. 2012. Pengaruh *Value For Money* terhadap kualitas pelayanan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga. Jakarta
- BPKP. 2004. *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta BPKP
- Nordiawan, dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Hidayat, Taufik Wahyu. 2015. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif *Value For Money*. *Jurnal Ilmu dan Riset dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya*.

- <http://www.antaranews.com/berita/514961/kemenag-ntb-jadi-pilot-project-bebas-korupsi>
- <http://www.jpnn.com/read/2015/02/11/286917/Dongkrak-Kinerja-Kemenag,-Lukman-Ajukan-Anggaran-Tambahan->
- <http://itjen.kemenag.go.id/web/article/berita/menag-kinerja-aparat-depag-jadi-sorotan>
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mulyadi, dan Setiawan. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian manajemen: Sistem Pelipat gandaan Kinerja Keuangan Perusahaan*, Salemba Empat: Jakarta
- Mahsun. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Edisi Pertama*, BPF, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Ketiga*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Sari, Nindy Cahya Feriska Sari. 2014. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013). *Artikel* Universitas Negeri Surabaya.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta.